

---

# MASYARAKAT DITENGAH JEPITAN KONTROVERSI EKOSISTEM LEUSER DAN LADIA GALASKA

(oleh: : Fachrurrazi “rajid” Ch. Malley)

## **Kemiskinan di Negeri Nan Kaya Raya**

Sulit memungkiri bahwa negeri serambi Mekkah – Nanggroe Aceh Darussalam – yang membentang di ujung utara pulau Sumatera adalah daerah yang teramat kaya.

Kelimpahan sumberdaya alamnya sungguh menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan merata bagi anak negeri sampai ke pelosok-pelosoknya. Beragam jenis sumberdaya alam –baik yang tampak di permukaan bumi seperti hutan dengan manfaat ekonomi maupun jasa ekologisnya, atau yang tersimpan di dalam perut bumi berupa bahan tambang berbagai jenis– terserak di mana-mana. Ini semua tersedia dan siap untuk dikelola, tentu bagi sebesar-besarnya kemakmuran “rakyat” dalam jangka panjang.

Namun, kekayaan hasil bumi ini ternyata tidak serta merta menjamin perolehan kemakmuran dan kesejahteraan merata bagi anak negeri. *Kelimpahan sumberdaya alam justru berbanding terbalik dengan kenyataan hidup yang dialami masyarakat setempat.*

Di wilayah-wilayah yang mudah diamati –semisal di sekitar proyek-proyek industri vital seperti di dekat kilang-kilang gas dan minyak, pabrik

semen, pupuk dan kertas, atau di sekitar industri-industri perkayuan– terpapar keadaan memprihatinkan tentang kehidupan masyarakatnya. Sementara kehidupan lingkungan usaha ini gemerlap dengan guyuran berbagai fasilitas modern, masyarakat sekitarnya kebanyakan hidup serba sederhana dengan rumah berlantai tanah atau semen retak-retak, berdinding papan keropos atau bata tak berplester, serta beratapkan rumbia atau seng berkarat. Hanya sebagian kecil dari masyarakat sekitarnya yang sedikit mampu berkehidupan sebaliknya.

Sementara itu pula, nun jauh dari imbas gemerlap guyuran fasilitas modern dan sering luput dari amatan, keadaan yang lebih parah dihadapi masyarakat yang memukimi wilayah-wilayah pedalaman yang masih berhutan dan hanya sesekali dapat terkunjungi oleh “orang luar”. Kunjungan ini hanya dapat dimungkinkan dengan menumpang jeep gardan empat yang sarat penumpang hingga ke atapnya, berbaur pula dengan hasil bumi dan ternak, yang berjalan terseok-seok menyusuri jalan-jalan sempit tanpa aspal yang berlobang-lobang dari satu kampung ke kampung lain, lalu mesti dilanjutkan dengan berjalan kaki melipir gigir jurang dan sesekali melompati bebatuan licin di

sungai-sungai. Namun demikian, sangat gampang pula menemukan pengalaman mengharukan ketika harus menerima keramahan masyarakat sederhana – yang mendiami gubuk-gubuk kecil di tengan hutan– dalam bentuk suguhan makanan yang mereka ambil dari cadangan terakhir yang masih ada.

## ***Menguras Hutan Dengan Beragam Cara***

Sumberdaya alam yang melimpah memang semestinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu sumberdaya alam yang dimanfaatkan besar-besaran untuk maksud tersebut adalah hasil hutan, terutama kayu. Agaknya, untuk maksud itulah sejak awal 70-an telah diberikan konsesi perusahaan hutan kepada lebih dari dua-puluh perusahaan HPH/HTI serta cukup banyak perkebunan yang mengkonversi hutan di seantero Nanggroe Aceh Darussalam.

Guna kelancaran usaha produksi kehutanan dan perkebunan berskala besar itu, para pemegang konsesi membuka wilayah hutan dan membangun berbagai sarana transportasi yang menjangkau hutan-hutan pedalaman Aceh. Jalan-jalan utama, jalan cabang dan jalan sarad berikut sarana pendukung lainnya

dibangun untuk mempermudah mengangkut kayu-kayu hutan hasil tebang. Sejalan dengan itu, berlangsung pula proses penyusutan luasan hutan yang cepat di daerah ini.

*Proses penyusutan luasan hutan dengan cepat terjadi karena eksploitasi resmi oleh para pemegang HPH/HTI atau konversi hutan untuk perkebunan berskala besar itu, ternyata diimbahi pula oleh praktek-praktek menyalah dan melanggar ketentuan yang seharusnya.* Akses jalan yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan perkayuan dan perkebunan kemudian dimanfaatkan pula oleh banyak pihak untuk ikut mengurus hasil hutan. Apa yang disebut dengan *penebangan liar atau pembalakan haram justru berlangsung semakin marak dengan memanfaatkan jalan-jalan yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan ini.*

Sesungguhnya, tak sulit bagi siapa pun untuk mengamati belasan truk pengangkut kayu gelondongan atau kayu olahan yang diperoleh dari pembalakan haram (penebangan liar) berseliweran menggunakan jalan yang dibangun perusahaan perkayuan kemudian melintasi perkampungan sederhana sebelum ke luar dari hutan. Dengan pengamatan seksama akan diketahui pula bahwa pengemudi truk-truk ini senantiasa berhenti pada pos-pos tak resmi di pinggir jalan untuk menyeter sejumlah uang pada oknum-oknum yang seyogyanya mempunyai kewenangan jabatan untuk ikut mengamankan kawasan hutan dari praktek-praktek penebangan hutan yang melanggar hukum. *Persekongkolan penjarah hutan ini berlangsung sangat rapi, meluas dan berlanjut. Itu mungkin sebabnya maka jarang sekali pelaku utama atas kasus kejahatan di bidang kehutanan yang sampai diadili di ruang pengadilan.* Kalau pun ada – satu dua kasus - maka yang menjadi terdakwa dan duduk di kursi pesakitan adalah warga kampung setempat!

### **Menjadi Orang Upahan di Negeri Sendiri**

Akses jalan menuju sumber-sumber kayu di dalam hutan banyak terdapat di mana-mana. Jaringan jalan ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang memukimi daerah terpencil untuk mengangkut hasil panen usaha budidaya mereka atau hasil hutan dan sungai yang

dipungut langsung karena ketersediaan yang melimpah.

Untuk memasarkan hasil usahanya pada hari-hari pasar di kota kecamatan, warga kampung kadangkala diperbolehkan menumpang truk logging perusahaan atau truk pengangkut kayu hasil tebang haram. Pada tempat lainnya di beberapa penggal jalan, masyarakat menggunakan alat transportasi umum yang dengan tertatih-tatih mencoba mampu menjangkau lokasi-lokasi tertentu. Selebihnya, ditempuh dengan berjalan kaki belasan kilometer ke pasar-pasar terdekat. Dengan kondisi seperti ini, pada beberapa kasus ditemukan kenyataan ada juga warga kampung yang sakit dan menemui ajalnya sebelum sempat sampai di rumah sakit terdekat guna memperoleh usaha pengobatan yang memadai.

**Kenyataan ini sungguh bertolak-belakang dari maksud “luhur” memanfaatkan kelimpahan sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat setempat.**

*Kehidupan pahit ini pada gilirannya mendorong keberanian masyarakat sekitar hutan untuk ikut terlibat dalam usaha menjarah hasil hutan. Sayangnya, mereka hanya berperan sebagai orang suruhan atau upahan dari para pemilik modal yang dilindungi aparat keamanan.* Kaum lelaki dari desa-desa setempat sering diupah –dengan dipinjamkan *senso* atau dikreditkan pembeliannya– untuk melakukan penebangan pohon dan membelahnya di dalam hutan, lalu menyaradnya dengan kerbau atau memanggulnya keluar hutan sampai di pinggir jalan cabang. Mereka juga diupah untuk membongkar-muat di kilang-kilang kayu yang tak jelas pula izinnya. Sementara, kaum perempuan mengambil upah mengupas kulit-kulit kayu gelondongan di base-camp HPH.

Pekerjaan penuh resiko ini sesungguhnya hanya mendapat upah yang kecil pula berdasarkan kemampuan jumlah hasil tebang. Untuk 2 minggu di dalam hutan – setelah dipotong biaya keperluan konsumsi sederhana, rokok murahan dan minyak *senso*, yang dipasok oleh pengupah– mereka kemudian hanya

membawa pulang ke rumah sejumlah uang untuk bisa membeli berbagai keperluan rutin sehari-hari guna memenuhi keperluan keluarga selama seminggu berikutnya.

### **Dwi Megaproyek yang Mbingungkan**

Menyusutnya luasan hutan dengan cepat dan tak kunjung meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat (...*kabarnya, lebih 60% rakyat Aceh masih miskin sementara lebih 80% pendapatan Aceh diperoleh dari hutan*), merisaukan banyak pihak pula. Pada tahun 1995 muncul gagasan dua megaproyek, yakni Program Pengembangan Leuser dan Program Ladia Galaska (semula disebut dengan 16 ruas jalan tembus jaring laba-laba).

**Program Pengembangan Leuser merupakan megaproyek seluas sekitar 1,79 juta hektar dengan beragam status kawasan hutan di dalamnya. Megaproyek yang ingin memadukan pelestarian hutan dengan pembangunan untuk menyejahterakan rakyat ini direncanakan berlangsung 30 tahun dan yang semula hanya berdasarkan keputusan menteri kehutanan lalu ditingkatkan menjadi sebuah keputusan presiden.**

Gagasan dengan iktikad “luhur” ini sudah diimplementasikan selama 7 tahun dengan rencana anggaran selama kurun waktu tersebut sebesar 50 juta mata uang Eropa.

Melalui publikasi media yang dilansir oleh pemrakarsa proyek ini, kecuali keberhasilan programnya dapat dikatakan *hampir tidak diketahui publik berbagai kegagalan atau penyimpangan dari proyek ini.* Namun, kebingungan publik mulai meruak ketika banyak pula media massa yang mengungkapkan bahwa Taman Nasional Gunung Leuser yang menjadi kawasan inti proyek ini ternyata terus dirambah selama proyek ini membiayai berbagai kegiatannya, sedang luas kawasan yang dikelola pemrakarsa menggelembung menjadi lebih dari 2,5 juta hektar dengan beberapa kegiatan berulang seperti penghijauan dan pematokan tapal batas (*.tak jelas apakah tanaman penghijauan ini terbakar alami atau sengaja dibakar; sedang patok-patok ini tak jelas*

*apakah sengaja dicabut kembali atau pematokannya fiktif belaka?).*

Kenyataan membingungkan ini menunjukkan bahwa *tak ada hubungan signifikan antara besarnya sumberdaya yang dikeluarkan untuk membiayai proyek ini dengan upaya mengamankan kawasan dari gencarnya perambahan*, serta tak ada pula kepastian luas kawasan ekosistem Leuser ini. Menarik juga mengamati bahwa meski di tahun 2001 telah dikeluarkan sebuah intruksi presiden kepada 8 pejabat tinggi setingkat menteri untuk memberantas penebangan liar di Taman Nasional Gunung Leuser, namun kegiatan memorakporandakan hutan di kawasan megaprojek ini tidak juga berhenti. (...*apakah sedang berlangsung “pembangkitan struktural” yang mengiringi megaprojek ini?*).

Sementara itu, megaprojek pembangunan jejaring jalan yang disebut dengan Ladia Galaska diduga akan dimulai pada tahun 2003 ini dan ditengarai telah pula mendapat rekomendasi presiden.

Proyek ini juga dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat pedalaman Aceh dengan membuka daerah-daerah yang terisolir dengan membangun ruas-ruas jalan sepanjang lebih dari 1.200 kilometer (...*kemudian memanjang lagi menjadi lebih dari 1.600 kilometer?*) dan jembatan-jembatan dengan panjang total sekitar 2.650 meter.

Pembangunan jalan dengan daerah milik jalan selebar 30 meter ini direncanakan tuntas dalam waktu 5 tahun dengan biaya lebih dari 1,18 triliun rupiah. Informasi tentang rencana pembangunan yang dilansir pihak terkait mengungkapkan bahwa *sebagian ruas jalan memang merupakan jalan-jalan lama yang hendak ditingkatkan mutunya, sedang sebagian lagi merupakan ruas jalan baru yang mesti membuka kawasan hutan alam –termasuk yang akan membelah Taman Nasional Gunung Leuser.*

Kebingungan banyak kalangan serta merta muncul karena ditengah belum redanya konflik politik yang menimbulkan korban jiwa dari hari ke hari dan ribuan pengungsi masih hidup terlunta-lunta, kehendak “luhur” untuk

membangun jalan ini sangat gencar dikumandangkan. Kehendak yang terkesan dipaksakan ini segera saja memunculkan reaksi penolakan terutama dari kalangan organisasi non-pemerintah yang berkantor di Jakarta yang kemudian diketahui merupakan bagian dari skenario penolakan yang dimobilisasi oleh pemrakarsa mega proyek pertama.

Promosi dua itikad “luhur” di atas berlangsung gegap-gempita di kota-kota besar jauh dari pedalaman hutan Aceh. Informasi terbatas tentang keduanya benar-benar membingungkan banyak kalangan, terutama rakyat setempat yang terpa kehidupan sangat menyulitkan. Di saat-saat mereka masih harus tertatih memikul hasil buminya untuk dijual ke kota dengan berjalan kaki menempuh belasan bahkan puluhan kilometer jalanan kampung, sebagian dari keluarga mereka ada yang tak jelas kuburnya atau tak tentu nasibnya di pengungsian, serta hutan yang dipasang plang himbauan untuk dilestarikan ternyata digerus habis-habisan di depan mata, ternyata hanya sayup-sayup mereka mendengar ada proyek-proyek besar untuk kepentingan mereka. Yang satu proyek melestarikan sumber-sumber daya alam untuk kesejahteraan hidup dalam jangka panjang namun tak begitu mereka pahami manfaat langsungnya, sedang yang lain proyek membuka isolasi daerah mereka dengan membangun sarana jalan padahal jalan-jalan yang sudah ada nyatanya digunakan pula untuk merambahi sumber-sumber kehidupan mereka.

Masyarakat pedalaman yang turun-temurun sangat akrab dengan potensi sumberdaya alam asli daerah ini sesungguhnya *tak tahu persis bahwa nama mereka teramat sering disebut-sebut dalam presentasi dwi megaprojek itu di ibukota propinsi dan ibukota negara ini, bahkan dalam forum-forum internasional di luar negeri.* Mereka juga tak tahu bahwa kedua megaprojek di daerah mereka ini saling bertentangan satu sama lain.

Beberapa di antara mereka – terutama yang merasa memperoleh sedikit keuntungan dari proyek, karena pendekatan “cerdik” dari pemrakarsa proyek– kemudian merasa pula menjadi bagian salah satu diantaranya untuk menentang dan mencerca yang lain.

Seperti inilah agaknya penyikapan masyarakat pedalaman terhadap kedua megaprojek ini. Dan, *ini tentu sangat rawan untuk menyulut konflik horizontal dan vertikal!*

### ***Aneka Kesamaan Dwi-Megaprojek***

Dwi-megaprojek ini – pengembangan Kawasan Ekosistem Leuser dan jejaring jalan Ladia Galaska – kecuali berbeda dalam menempuh cara untuk menyejahterakan rakyat, sesungguhnya mempunyai banyak kesamaan. *Jika dirunut maka setidaknya akan diperoleh senarai kesamaan itu, antara lain: proyek sama-sama di daerah Aceh, sama-sama mendapat restu presiden dan persetujuan gubernur, sama-sama terkesan punya niat luhur dan kehendak yang kuat, sumberdana sama-sama berasal dari luar negeri (hibah dan hutang), sama-sama melibatkan perantau Aceh, sama-sama memobilisasi dukungan ornop luar Aceh untuk lebih risau dari orang Aceh di daerah, pelibatan masyarakat sama-sama dilakukan dari atas (top-down), sama-sama ditengarai rawan perilaku korupsi oleh banyak pihak, dan banyak aneka kesamaan lainnya.*

Dalam perspektif seperti ini, keberatan dari masing-masing pihak sebagai implikasi perbedaan pilihan cara tak semestinya harus “dipertarungkan” dengan mengatasnamakan masyarakat. Kompromi tentu jauh lebih baik bagi masyarakat setempat. Karena, kompromi dalam hal ini tentu dimaksudkan untuk mengurangi, meredam, bahkan menghilangkan berbagai ragam kekhawatiran yang ditengarai oleh yang lain apabila dwi-megaprojek ini mesti dilanjutkan juga.

Untuk sampai pada maksud ini, *keterbukaan tentang banyak hal menjadi keharusan. Sikap menutup diri yang cenderung eksklusif dan anti-dialog dengan maksud hanya melindungi “kepentingannya semata” lalu menyerang pihak lainnya dengan memobilisasi dukungan semu hanya akan menyuburkan prasangka yang dapat berkembang menjadi tuduhan membabi-buta, yang berujung pada fitnah.*

Keterbukaan akan banyak hal tentang kedua proyek besar ini memang akan menuai banyak kritik. Namun, kritikan ini tentu dapat pula digunakan

untuk menyempurnakan gagasan dan memperbaiki kekeliruan, jika ada. Ini juga akan membantu memperoleh berbagai tawaran pilihan untuk mengantisipasi hal-hal buruk dari kedua proyek.

Lazim dalam pelaksanaan proyek di era reformasi ini, akan dituai pula tuntutan banyak kalangan –terutama para pemangku kepentingan utama/pendukung– agar pemrakarsa proyek senantiasa menganut prinsip-prinsip atau nilai-nilai tertentu seperti berkeadilan, pelestarian, berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas, kontributif-partisipatif, dan lain sebagainya.

Untuk itu, seyogyanya masing-masing pemrakarsa beserta para pemangku kepentingan lainnya menghindari perbedaan tafsir tentang pemaknaan prinsip-prinsip ini dalam pengerjaan proyek. Perbedaan tafsir yang dibiarkan, akan membuka peluang untuk mengelak dari tanggung-jawab ketika penyimpangan-penyimpangan terjadi, meski disengaja mau pun karena lalai atau ceroboh.

Lalu, bila sekedar hanya menyimak paparan proyek –yang

dikemas menjadi produk media nan rancak– agaknya tak ada yang dapat dibantah dari argumen yang dibangun keduanya. Namun, cukup mudah untuk dapat menemukan bahwa *sering sekali apa yang dipaparkan di tahap perencanaan jarang sekali persis sungguh dengan kenyataan kejadian dan peristiwa yang kemudian berlangsung*. Kadangkala diketahui pula kemudian bahwa *apa yang dilaporkan resmi atau dipublikasikan meluas ternyata berbeda dengan apa yang ada*.

Pada situasi seperti ini, biasanya upaya pembenaran agar mendapat kemakluman dilakukan dengan cara-cara yang kurang pantas. Karena itu, bagaimana kegiatan-kegiatan proyek dapat dipantau perkembangannya serta bagaimana hasil-hasilnya dapat dinilai baik-buruk atau benar-salahnya oleh banyak pihak, menjadi sangat penting untuk selalu dibicarakan. Dengan begini, umpan balik yang konstruktif akan lebih mudah diperoleh.

Dalam kaitan itu semua, *masyarakat luas –terutama masyarakat setempat– semestinya*

*mengetahui sepenuhnya tentang rencana, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil-hasil yang akan dan telah diperoleh. Dengan kata lain, masyarakat mesti berperan dalam setiap tahapan proses proyek dan pelibatan ini harus terinternalisasi pula dalam anggaran proyek.*

Berperannya masyarakat setempat dalam setiap tahapan selayaknya menjadi keniscayaan, karena atas nama merekalah dwi-megaproyek ini mendapat dukungan dan bantuan dari mana-mana. Karena itu, sudah *semestinya menjadi jelas bagi masyarakat pedalaman Aceh apa manfaat dan kerugiannya bagi mereka kalau dwi mega proyek ini dilanjutkan, serta bagaimana pula kalau bagian proyek yang sedang berjalan dihentikan dan yang belum dikerjakan, ditunda dulu atau dibatalkan saja.*

Berikan dengan tulus dan seutuhnya pilihan itu pada mereka agar apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat bukan sekedar retorika dan rekayasa manipulatif! ■

Foto: FWI



Pembangunan Jalan LADIA GALASKA